

70 Tahun DPR, Bisa Apa?

MASYARAKAT lebih mafhum tanggal 16 Oktober sebagai Hari Pangan Sedunia (HPS). Namun tanggal itu juga diperingati sebagai Hari Parlemen Indonesia (HPI). Tidak seperti peringatan lain, HPI jarang (bahkan tidak pernah) diperingati secara khusus. Tak heran apabila anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif (parlemen) besar kemungkinan tidak mengetahui adanya peringatan HPI. Padahal hari peringatan ini dapat dijadikan momentum bagi para wakil rakyat untuk mengevaluasi kinerja sekaligus berefleksi.

Penetapan HPI merujuk pada Maklumat Pemerintah Nomor X (baca: iks, bukan 10) tanggal 16 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden M Hatta. Maklumat ini berawal dari tuntutan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menghendaki perubahan status. Melalui maklumat tersebut, KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara sebelum MPR dan DPR terbentuk. Pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh Badan Pekerja (BP-KNIP) yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada KNIP.

Sejak saat itulah KNIP menjalankan fungsi MPR, sedangkan BP-KNIP menjalankan fungsi DPR. Di daerah-daerah juga dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang dapat disamakan fungsinya dengan DPRD. KNIP menjalankan fungsi legislatif sampai 15 Februari 1950, saat dibentuknya DPR dan Senat berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Jauh dari Harapan

Dalam keterbatasan saat itu, para pendiri bangsa berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik atas dasar Trias Politica dan prinsip-prinsip demokrasi. KNIP sebagai lembaga legislatif, yang tidak dibentuk

Oleh Hendra Kurniawan



melalui pemilu, bekerja tulus dan bersinergi demi rakyat dan negara. Terbukti dengan keberhasilan pemerintah bersama rakyat menghadapi kekuatan Belanda yang berusaha bercokol kembali. Masih ditambah berbagai pergolakan yang muncul di daerah-daerah.

Teladan sinergis pada awal pembentukan parlemen ini dapat dijadikan cermin. Polarisasi politik yang terjadi saat ini dalam tubuh DPR, antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) seringkali meruncing karena kepentingan politik golongan. Belum lagi orientasi kebanyakan anggota DPR saat ini berbanding terbalik dengan perjuangan anggota parlemen pertama 70 tahun lalu.

Dalam prinsip *division of power*, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus menjadi

mitra. Maka relasi dan sinergi yang baik harus diwujudkan agar roda pemerintahan berjalan lancar, jauh dari gejolak, namun juga tidak lepas kontrol. Tidak bijak apabila pemerintah berjalan tanpa oposisi dan pengawasan karena bisa melahirkan otoritarian. Akan tetapi sebaliknya jangan pula DPR menjadi ajang manuver politik untuk menjegal dan mencari-cari celah kesalahan pemerintah.

Komunikasi yang intens antara DPR dengan pemerintah sangat diperlukan agar masalah dapat cepat diatasi dan bukan justru menjadi kesempatan untuk saling melempar bola panas. Sejatinya praktik demokrasi kita berbasis gotong royong dan kekeluargaan, sehingga upaya saling menjatuhkan pihak lain merupakan perilaku yang tidak etis. Pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas DPR mendorong berkembangnya wacana kritis bahwa masyarakat tidak lagi memerlukan DPR. Keberadaan DPR dianggap sudah mandul dan kehilangan fungsi.

70 Tahun...

(Sambungan Hal 4)

Bahkan seringkali DPR memicu kontroversi, misalnya dengan mengulirkan wacana pembubaran KPK, kenaikan gaji anggota DPR, hingga perumusan anggaran-anggaran fantastis.

Padahal dengan menyandang gelar wakil rakyat, DPR diharapkan menghadirkan pikiran, perasaan, dan kehendak rakyat. Sayang situasi nyata sekarang semakin jauh dari ekspektasi. Kunci keberhasilan DPR terletak pada relasi yang erat dengan rakyat, sehingga keinginan rakyat dapat dipahami dan diwujudkan. Sangat disayangkan bila ada wakil rakyat yang tidak sadar siapa yang diwakilinya. Bagaimana pun asas Salus Populi Suprema Lex harus dipegang teguh oleh siapa saja yang memiliki kewenangan terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Akhirnya setiap kebijakan menyangkut persoalan rakyat harus berorientasi pada kepentingan rakyat pula. Untuk itu dibutuhkan ketulusan agar setiap keputusan yang diambil tidak bermuara pada egoisme politik pribadi dan kelompok tertentu. Semoga mencapai usianya yang ke-70, DPR mampu menemukan kembali kesadaran diri akan tugas dan perannya. (43)

— Hendra Kurniawan MPD,
dosen Pendidikan Sejarah Universitas
Sanata Dharma (USD) Yogyakarta